

Rapat Paripurna DPR Setujui 42 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023

apat Paripurna DPR
RI telah menyetujui
sebanyak 42 Rancangan
Undang-Undang (RUU)
masuk Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) Prioritas
Tahun 2023. Keputusan itu didapati
setelah mendengar penjelasan
Badan Legislasi (Baleg) DPR atas
hasil evaluasi pelaksanaan Program
Legislasi Nasional Tahun 2023.

"Apakah laporan Baleg DPR RI atas hasil evaluasi pelaksanaan Program Legislasi Nasional Tahun 2023 dapat disetujui," tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/8). Seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju terhadap atas hasil evaluasi pelaksanaan Program Legislasi Nasional Tahun 2023 yang dilakukan oleh Baleg DPR RI bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Panitia Perancang UU DPD RI.

Dalam laporannya, Pimpinan Badan legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi menyampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang menyebutkan bahwa evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) menyebutkan dalam hal disepakati adanya perubahan Prolegnas jangka menengah dan/ atau Prolegnas prioritas tahunan berdasarkan evaluasi, perubahan Prolegnas jangka menengah dan/



Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (29/8/2023).

atau Prolegnas prioritas tahunan disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan.

Memperhatikan capaian tersebut dan mengingat kebutuhan hukum dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Baleg bersama dengan Menteri Hukum dan HAM serta PPUU DPD RI dalam rangka evaluasi Prolegnas Tahun 2023 menyepakati untuk menarik 9 RUU dari Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 karena sudah masuk dalam Omnibus Law UU Kesehatan dan Omnibus Law UU Pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK).

Selanjutnya, Rapat Kerja Baleg bersama Menteri Hukum dan HAM serta PPUU DPD RI juga menyepakati untuk menambah 4 RUU masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, yaitu RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (usulan Pemerintah), RUU tentang Penilai (usulan pemerintah), RUU tentang Pengelola Ruang Udara Nasional (usulan Pemerintah) dan RUU tentang Permuseuman (usulan DPR/Baleg).

Kemudian, Memasukan 3 RUU dan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 yaitu RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (usulan pemerintah), RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional (usulan Pemerintah), dan RUU tentang Permuseuman (usulan DPR/Baleg). Serta Prolegnas RUU Perubahan Kelima Tahun 2020-2024 menjadi 253 yang sebelumnya 259 RUU.







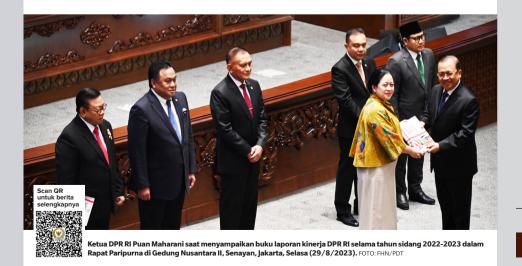
DPR Terus Pastikan APBN Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

etua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kinerja DPR RI selama tahun sidang 2022-2023 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8). Dalam pidatonya Puan mengatakan bahwa melalui fungsi anggaran, DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 dan pembahasan Pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024.

Perekonomian Indonesia Tahun 2022 dan 2023, lanjut Puan, menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat di tengah pemulihan sosial-ekonomi nasional dan tantangan global. Oleh sebab itu APBN sebagai instrumen negara telah bekerja keras dalam menagerakkan perekonomian nasional, memberikan perlindungan sosial dan menjalankan pemulihan ekonomi nasional.

"DPR RI bersama pemerintah sedang melaksanakan pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2024. DPR RI akan terus mencermati dan memastikan bahwa APBN sebagai instrumen keuangan negara harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun perekonomian nasional dan melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia." uiar Puan.

🗫 bia/aha





PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAHIr. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANADr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website) Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media) Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

Andi Ntru Nauvak Kambanina, Andi Jisa Andi Jisa Andi Jisa Andi Gotta Rebaksi
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Prattiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom, Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyritha, Anju Alfonco Sitompul, Zuffikar Mublen

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan) PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

DESAIN GRAFIS

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa S Kom Savant Rifni Hidavat S E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi) KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email: bag_penerbitan@dpr.go.id

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERM<u>intaan hasil</u> CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

DPR Susun Laporan Kinerja 2022-2023, **Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Rakyat**



Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat menghadiri Rapat Paripurna Khusus HUT ke-78 DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa ((29/8/2023).

ndana-Undana Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. DPR RI menjalankan tugasnya untuk rakyat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan amanat kedaulatan rakyat, DPR RI menjalankan fungsifungsinya dengan mengarahkan kebijakan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan pembangunan untuk memastikan bahwa Pemerintah Negara Indonesia menjalankan amanat konstitusi.

DPR RI dalam menjalankan tugas konstitusinya, juga semakin dituntut untuk dapat memiliki kapasitas pemahaman yang luas terhadap berbagai kompleksitas isu, permasalahan, dan substansi. Sehingga kebijakan-kebijakan dalam politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan DPR RI memiliki substansi yang kuat. Komitmen DPR RI dalam menjalankan tugas konstitusi dan amanat rakyat, disusun dalam Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023, dengan tema "DPR RI Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju".

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat diwawancarai Parlementaria dan awak media usai menghadiri Rapat Paripurna Khusus HUT ke-78 DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa ((29/8) menyatakan buku laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2022-2023 tersebut secara lengkap telah disusun dalam dokumen yang akan dibagikan sebagai pertanggungjawaban terhadap segenap konstituen kepada seluruh pihak dan terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Kita sepakati ini juga pertanggungjawaban kita Anggota DPR kepada konstituen kita. Sehingga kalau kita lihat tadi ada buku yang tebal, tetapi ada juga buku yang kita bisa bawa ke dapil. Sehingga di dapil masing-masing bisa kita pertanggungjawabkan ini loh hasil kinerja Anggota DPR yang mewakili dapil setempat hasil kerja kita, nah itu yang kita lakukan. Nah tentunya yang menyangkut isi, pertama terkait dengan fungsi pengawasan dalam hal ini juga menyerap aspirasi. Nah itulah serapan aspirasi ini kita sampaikan dalam laporan yang sudah dirancang sedemikian bagus," ujar Lodewijk.

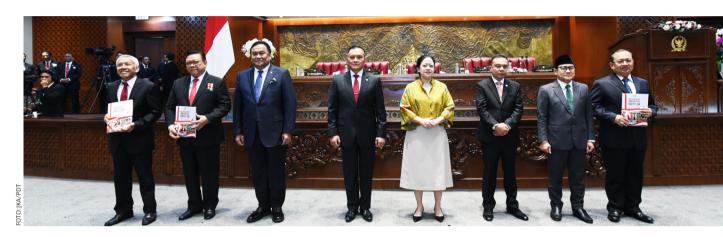
Kedua, sambung Politisi Partai Golkar ini, yakni dalam fungsi legislasi juga dilaporkan adanya jumlah UU yang berhasil disahkan oleh DPR baik inisiatif DPR RI, Pemerintah termasuk inisiatif DPD RI. Adapun terkait fungsi anggaran, Pimpinan DPR RI Bidang Korpolkam ini mengungkapkan Fraksi-Fraksi sangat mengkritisi masalah anggaran tersebut agar anggaran disiapkan betul-betul dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.

pun/aha





HUT DPR RI Ke-78, Pimpinan DPR Tegaskan Sinergi dengan Pemerintah



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Achmad saat foto bersama usai menyampaikan buku laporan kinerja DPR RI selama tahun sidang 2022-2023 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Achmad menegaskan DPR RI sebagai wakil rakyat berkomitmen untuk terus menjalankan tugas dan tanggung jawab. "Kami dengan integritas dan ketulusan berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan bersinergi bersama pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik," ujar Dasco memperingati HUT DPR RI Ke-78 tahun di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).

Dalam kesempatan itu, usai menghadiri sidang Paripurna DPR RI, Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menyempatkan diri mengunjungi Bazaar atau Pasar Murah yang digelar oleh PIA (persaudaraan Isteri Anggota) DPR RI dalam rangka HUT DPR RI, di loby gedung nusantara II, Senayan Jakarta. "Saya lihat bazaar tahun ini lebih ramai dari tahun sebelumnya. UMKM (Usaha mikro kecil menengah) yang ada juga bermacam atau beragam jenis. Sehingga saya mengapresiasi minat UMKM yang semakin banyak ini," tambahnya.

Oleh karena itu, pihaknya menyambut positif kegiatan bazaar yang digelar oleh Ibu-Ibu PIA DPR RI tersebut. Dalam kesempatan itu, ia juga berharap dengan adanya bazaar atau pasar murah ini para UMKM yang dalam beberapa tahun belakangan sempat terpuruk akibat Pandemi Covid-19 itu dapat memasarkan produknya dengan baik. Dengan kata lain dengan meningkatnya minat UMKM untuk memasarkan produknya, maka hal itu juga akan mempengaruhi peningkatan daya beli masyarakat.

Sementara itu Wakil Ketua PIA DPR RI, Raden Euis Handayani Sufmi Dasco mengucapkan rasa syukurnya selain dengan usia baru DPR RI yang tahun ini menginjak 78 thun. Selain itu Euis berharap para anggota DPR RI dapat terus mendukung kegiatan PIA DPR RI sepanjang kegiatan tersebut positif.

"Saya apresiasi kekompakan dari teman-teman PIA DPR, akhirnya bazaar dan pasar murah yang digelar dalam rangka HUT DPR RI Ke-78 ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Tidak hanya itu, saya juga berterima kasih kepada para anggota DPR RI yang telah mengijinkan ibu-ibunya menggelar acara positif hari ini. Saya berharap kekompakan ini dapat terus terjaga dengan baik, sehingga secara tidak langsung juga menjadi dukungan tersendiri kepada para suami dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPR RI," ungkap Euis.

ayu/aha



27 RUU tentang Kabupaten/ Kota Disetujui Jadi RUU Usul Inisiatif DPR RI

apat Paripurna
DPR RI ke-4 Masa
Persidangan I Tahun
Sidang 2023-2024
menyetujui 27 RUU
tentang Kabupaten Kota Usul
Inisiatif Komisi II untuk menjadi
RUU Usul Inisiatif DPR RI. Hal
itu sebagaimana disampaikan
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F.
Paulus yang memimpin jalannya
rapat paripurna tersebut, pasca
penyerahan pendapat umum
masing-masing fraksi secara
tertulis kepada Pimpinan DPR RI.

"Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat kepada 27 RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Kota/Kabupaten, apakah dapat disetujui?" tanya Lodewijk di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8). "Setuju," jawab hadirin Anggota DPR di rapat tersebut.

Sebelumnya, juru bicara perwakilan masing-masing fraksi menyerahkan pendapat umumnya secara tertulis. Adapun 27 RUU yang telah disahkan menjadi 27 RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang RUU Kabupaten/Kota, seperti Kota Banda Aceh, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Belitung dan lainnya.

Fraksi PDI-Perjuangan, misalnya, dalam pandangan tertulisnya, disampaikan bahwa fraksi tersebut memberikan



Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat memimpin rapat paripurna pasca penyerahan pendapat umum masing-masing fraksi secara tertulis kepada Pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2023).

apresiasi, terutama terkait sejumlah ketentuan dalam ke-27 RUU, yang tidak sekedar mengatur administrasi pemerintahan dan administrasi wilayah, baik terkait posisi, batas wilayah pembagian/cakupan wilayah, ibu kota, dan personel, aset, dan dokumen sebagaimana umumnya materi muatan RUU Daerah Otonom.

Senada, Fraksi Partai PPP DPR RI juga menyetujui 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul inisiatif Komisi II tentang Kabupaten/Kota untuk disahkan menjadi RUU usul DPR RI. Anggota Fraksi PPP DPR RI Syamsurizal menilai pentingnya penyesuaian terhadap 27 Undang-Undang yang dikeluarkan tahun 1956 untuk mengikuti perkembangan zaman.

Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) menilai,
RUU tersebut sangat penting
dengan harapan tercapainya
kesejahteraan masyarakat
dalam mewujudkan masyarakat
yang baldatun thoyyibatun
warrobun ghofur. Fraksi PPP
menlai undang-undang yang
dikeluarkan pada tahun 1956
tentang Pembentukan 27
Kabupaten/Kota sangat perlu
untuk dilakukan penyesuian
dengan perkembangan zaman.

we,tn/rdn





HUT ke-78 DPR RI, Doa dan **Harapan Legislator untuk DPR**

PR RI pada 29 Agustus 2023 genap berusia 78 tahun. Sejumlah Anggota DPR RI beramai-ramai menyampaikan harapan dan doanya pada lembaga yang dulunya adalah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) ini. Diantaranya adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, ia berharap DPR RI sebagai wakil rakyat berkomitmen untuk terus menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan tugastugasnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Kami dengan integritas dan ketulusan, kami berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan bersinergi bersama pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik," kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini dalam keterangannya, Selasa (29/9).



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat foto bersama usai menyampaikan buku laporan kinerja DPR RI selama tahun sidang 2022-2023 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II. Senayan, Jakarta, Selasa

SEMOGA DPR RI SEMAKIN DICINTAL **RAKYAT DAN BISA MENGABDI UNTUK** KEPENTINGAN **RAKYAT DAN SELANJUTNYA NEGARA** INDONESIA AKAN **MENJADI NEGARA** YANG MAJU **MAKMUR DAN** SUKSES.

Wakil Ketua Baleg Willy Aditya iuga demikian, ia berharap semua kinerja dan apa yang dihasilkan di DPR dapat berpihak kepada rakyat. "Mari bersama-sama kita restorasi DPR sebagai rumah rakyat Indonesia. Parlemen modern yang mengalirkan transparansi akuntabilitas dan spirit kolaborasi. DPR berpihak rakyat berdaulat,"

Lain lagi dengan Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus dan Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah, keduanya berharap agar DPR bisa benar-benar menjadi penyalur aspirasi rakyat. "Semoga memberikan perwakilan rakyat yang benar-benar mengaspirasikan apa

yang diinginkan oleh masyarakat Republik Indonesia, semoga sukses dan jaya selalu," kata Alien

Namun dari semua itu, seperti kata Anggota Komisi II DPR RI Ibnu Multazam, semoga DPR RI bisa semakin dicintai rakyat dan pengabdian selama ini benarbenar demi kepentingan rakyat semata. "Semoga DPR RI semakin dicintai rakyat dan bisa mengabdi untuk kepentingan rakyat dan selanjutnya negara Indonesia akan menjadi negara yang maju makmur dan sukses," pungkas Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

we/aha



Paspampres Aniaya Warga Aceh, Lodewijk Ingatkan Sumpah Sapta Marga Prajurit TNI

akil Ketua DPR RI Lodewiik F. Paulus mengingatkan seluruh Prajurit TNI untuk mengingat kembali Sumpah Sapta Marga untuk taat kepada undangundang dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu Lodewiik sampaikan dalam rangka menyoroti kasus oknum anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dari unsur TNI yang diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap seorang warga asal Aceh hingga tewas.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun meminta pelaku dihukum setimpal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga turut menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut. "(Kejadian) itu kita harapkan ini juga menjadi peringatan bagi prajurit-prajurit yang lain tetap betul-betul sebagai prajurit Sapta Marga yang taat terhadap undangundang yang berlaku. Karena prajurit itu kan punya jati diri. Kita dikatakan lahir dari rakyat maka janganlah kita menyakiti hati rakyat," ujar Lodewijk, Jakarta, Selasa (29/8).

la menekankan dirinya pernah aktif menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1981 hingga 2015 dengan pangkat terakhir sebagai Letnan Jenderal TNI. Sehingga, ia menilai, apapun alasannya, seorang prajurit TNI yang melakukan penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum.

"Kita sudah mendengar bagaimana komitmen dari Puspom TNI maupun Angkatan Darat, kemudian dari Panglima TNI untuk menindak para pelaku ini ada tiga orang, untuk

PERINGATAN BAGI PRAJURIT-PRAJURIT YANG LAIN TETAP **BETUL-BETUL SEBAGAI** PRAJURIT SAPTA MARGA YANG TAAT TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU.

betul-betul mendapat tindakan setimpal yang hukuman setimpal sesuai peraturan yang berlaku," tutup Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono mengatakan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono prihatin atas kabar anggota Paspampres, Praka RM, yang diduga menganiaya pemuda hingga tewas. Panglima TNI akan mengawal kasus

hingga Praka RM dijatuhi hukuman berat.

"Penganiayaan oleh anggota Paspampres yang mengakibatkan korban meninggal, Panglima TNI prihatin dan akan mengawal kasus ini agar pelaku dihukum berat, maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup." kata Julius kepada wartawan, Senin (28/8).

Dia mengatakan Praka RK pasti dipecat dari instansi TNI. Saat ini Praka RM masih ditahan Pomdam Jaya untuk diperiksa terkait kasus penganiayaan berujung kematian korban tersebut. "Dan pasti dipecat dari TNI karena termasuk tindak pidana berat, melakukan perencanaan pembunuhan," kata dia.

we/rdn





Komisi I Dorong RRI Mataram **Tingkatkan Partisipasi Generasi Muda dalam Pemilu**

enerasi muda, khususnya yang berasal dari kalangan Generasi Milenial dan Generasi Z, memiliki peranan penting untuk menentukan arah demokrasi Indonesia terutama dalam menghadapi Pemilu 2024. Oleh karenanya, generasi muda perlu mendapatkan informasi yang yang ielas.

Di sisi lain, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI memiliki peranan penting, terutama dalam menyajikan program-program yang dapat lebih efektif. Hal itu dalam rangka untuk menjangkau serta menarik perhatian generasi muda untuk berkontribusi dan terlibat aktif dalam pemilihan umum tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi I DPR RI Fadli Zon saat memimpin rombongan ke LPP RRI Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, (24/8). "Milenial dan gen Z memiliki potensi besar dalam menentukan arah demokrasi negara kita. Oleh karena itu, program-program RRI haruslah mampu berbicara dengan bahasa yang relevan bagi mereka, serta menyampaikan pesan-pesan yang memotivasi partisipasi aktif dalam pemilihan umum," ujar Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Di sisi lain, berdasarkan paparan dari Kepala Stasiun LPP RRI Mataram, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif program siaran yang sudah dilakukan dengan melibatkan beberapa kelompok generasi muda.



Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI Fadli Zon saat bertukar cenderamata usai memimpin Kunspek Komisi I DPR RI ke LPP RRI Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, (24/08/2023).

Fadli Zon menambahkan bahwa betapa pentingnya memiliki peta profil pendengar yang jelas agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan menjangkau target lebih luas dan sesuai.

"Kami minta ke depan LPP RRI, tidak hanya Mataram. dapat memiliki peta profil pendengar. Sehingga, mampu merancang konten siaran yang berkontribusi untuk menciptakan suasana Pemilu yang kondusif, dan meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kuantias dan kualitas, khususnya generasi milenial dan Gen Z," tutup Fadli.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Stasiun RRI Mataram Yanto Prawironegoro menyambut baik Komisi I DPR ini dan berkomitmen untuk mengembangkan programprogram khusus yang akan menghadirkan wawasan politik dan informasi seputar pemilihan umum dengan pendekatan yang menarik dan interaktif bagi milenial dan gen Z.

"Kami dari LPP RRI Mataram sendiri sangat terbuka atas masukan-masukan yang diberikan oleh Komisi I DPR terkait sosialisasi pemilu kepada generasi-generasi muda, kami pun telah membuat beberapa program dengan tagline #kanalpemilihcerdas sebagai inisiatif program siaran Pemilu 2024," ungkap Kepala Stasiun LPP RRI Mataram tersebut.

blf/rdn



TVRI Jambi Diminta Lebih Gencar Sosialisasikan Informasi Pemilu Ke Generasi Muda

nggota Komisi I DPR RI, Hasbi Anshory, meminta TVRI Jambi untuk lebih gencar dalam menyebarkan dan menvosialiasikan informasiinformasi terkait pemilu khususnya kepada anak-anak muda. Hal tersebut dilontarkannya dalam rapat Kunjungan kerja Spesifik Komisi I ke TVRI Jambi pada Kamis (24/8).

"Ada sedikit PR untuk TVRI Jambi. bahwa partisipasi pemilih untuk DPR RI in cuma 60% berarti kita harus

ADA SEDIKIT PR UNTUK TVRI JAMBI. **BAHWA PARTISIPASI** PEMILIH UNTUK **DPR RI IN CUMA 60%** BERARTI KITA HARUS MENSOSIALISASIKAN KE MASYARAKAT BAHWA PENTINGNYA PEMILU



Anggota Komisi I DPR RI, Hasbi Anshory saat mengikuti pertemuan rapat Kunjungan kerja Spesifik Komisi I ke TVRI Jambi pada Kamis (24/8/2023)

mengunjungi sebuah acara. Di sana ia mendapati bahwa kebanyakan peserta yang berasal dari generasi muda tidak mengetahui tanggal penyelenggaraan pemilu mendatana.

"Sekitar dua bulan yang lalu saya diundang ada acara di RRI itu nama acaranya Cerdas Memilih, saya lupa. Itu mengundang adikadik millenial dan alhamdulillah banyak sekali tidak tahu tanggal pemilu itu, untuk election day-nya tanggal berapa banyak sekali yang tidak tau," ujarnya dengan nada satir.

Hasby pun lantas mengingatkan bahwa proporsi generasi muda semakin besar dan apabila sebagian besarnya tidak menerima informasi pemilu maka menimbulkan kerepotan. Ia pun menyatakan bahwa dengan banyaknya yang tak mengetahui tanggal penyelenggaraan pemilu maka bukan tak mungkin banyak pula yang belum mengetahui partai peserta pemilu dan perorangan yang ikut dalam pemilihan calon anggota legislatif di tiap tingkatan.

"Jadi ini kelas millennial. sementara generasi millenial dan generasi X kita itu hampir 56 persen. Kalau lebih dari 50 persennya tidak mengetahui kalau pemilu itu tanggal 14 februari (2024) itu kan repot. Pemilu saja tidak tahu apalagi partai politik, apalagi peserta pemilu orangnya. Itu yang perlu kita sikapi,' ujar Hasbi. 🗫 uc/aha





Penyelenggara Pemilu Kota Solo Diharapkan Mampu Tekan Indeks Kerawanan Pemilu

nggota Komisi II **DPR RI Mohammad** Toha berharap penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Solo mampu tekan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari Status Rawan Sedang meniadi Rawan Rendah, Pasalnya, ia menjelaskan, IKP ini menentukan tingkat pelanggaran dan kerawanan pada Pemilu 2024.

Sebagai informasi, nilai IKP Kota Solo berada pada tingkat 4 (empat) teratas Provinsi Jawa Tengah. Memperoleh skor 46.24 maka Kota Solo dinyatakan masuk dalam

KONSTELASI POLITIKNYA ITU HARUS LEBIH **DEMOKRATIS YANG DEKAT DENGAN ASAS** PEMILU (YANG) LUBER DAN JURDIL ITU. NAH. **DENGAN BEBERAPA** MASALAH YANG TADI (DISEBUTKAN), KAMI

HARAP BISA MENJADI

PERHATIAN KPU DAN

BAWASLU.



Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (24/8/2023).

Jurdil itu. Nah, dengan beberapa masalah yang tadi (disebutkan), kami harap bisa menjadi perhatian KPU dan Bawaslu," ucap Toha usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR guna memantau perkembangan terkini persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Solo. Provinsi Jawa Tengah, Kamis (24/8).

Di sisi lain. Politisi Fraksi PKB itu mengusulkan agar petugas pengawas pelaksanaan pemilu terutama di tingkat kelurahan ditambah. Dirinya tidak ingin polemik terjadi akibat keterbatasan SDM. "Saya menerima informasi kalau setiap kelurahan desa itu hanya satu pengawas di desa atau kelurahan ya. Ini mungkin bisa ditambah. Saya tidak ingin ini menjadi persoalan," ujarnya.

Oleh karena itu, Legislator Dapil Jawa Tengah V itu menekankan nilai sinergi diupayakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Baginya, nilai ini krusial mengingat KPU dan Bawaslu harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Solo demi terwujudnya Pemilu yang Jurdil

Sebagaimana yang diketahui, IKP merupakan upaya yang dilakukan dengan menggelar pemetaan sekaligus deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran jelang Pemilu. Indikator yang digunakan meliputi konteks sosial, konteks politik, dan dukungan infrastruktur.

ts/rdn

Komnas HAM dan LPSK Jangan **Tebang Pilih Kasus**

nggota Komisi III DPR RI Johan Budi, menyayangkan absennya Komnas HAM dan LPSK dalam beberapa kasus. Dia menegaskan jangan sampai dua lembaga ini tebang pilih kasus. Dia pun mengungkap, ada kasus siswi diperkosa oleh gurunya, namun Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK tidak terlihat. Begitu juga dengan kasus penganiayaan yang melibatkan oknum Paspampres terhadap warga Aceh hingga tewas, tidak ada kehadiran Komnas HAM dan LPSK.

"Saya enggak mendengar Komnas HAM, LPSK ada di sana, yang anak-anak minta visum, anak-anak diperkosa guru, saya enggak lihat itu ada Komnas HAM, LPSK. Kejadian barubaru ini, warga dipukuli oknum Paspampres saya enggak melihat dan mendengar dan melihat ada Komnas HAM, LPSK di sana.

SAYA KIRA KALAU **DILIHAT DARI REKAM** JEJAK. KASUS SAMBO MISAL, LPSK MUNCUL TERUS, **KOMNAS HAM** MUNCUL TERUS. **KENAPA KOK KASUS-**KASUS INI SAYA TIDAK MELIHAT APA **SKALA PRIORITAS** KOMNAS HAM, LPSK.

apa itu bukan jangkauan kerja Komnas HAM dan LPSK?" tandas Johan saat rapat bersama KPK. Komnas HAM, LPSK dan Komnas Perempuan, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8).

Menurutnya Komnas HAM dan LPSK terkesan hanya muncul di momen-momen tertentu. "Saya kira kalau dilihat dari rekam jejak, kasus Sambo misal, LPSK muncul terus. Komnas HAM muncul terus. kenapa kok kasus-kasus ini saya tidak melihat apa skala prioritas Komnas HAM, LPSK. Tolong Komnas HAM, LPSK kalau terjun tangani kasus, jangan memilih yang ramai diberikan tapi event tertentu yang menyedot rasa kemanusiaan tak ada Komnas HAM, LPSK," papar Johan.

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta Komnas HAM hingga LPSK turun tangan dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan seorang pemuda Aceh bernama Imam Masykur tewas, "Kepada LPSK, Komnas HAM dan Komnas Perempuan, saya menyampaikan aspirasi masyarakat di Aceh karena barubaru ini terjadi suatu peristiwa

yang sangat mengenaskan, yang boleh kita katakan tidak sejalan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab." kata Nasir.

Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya/Jayakarta sebelumnya telah menahan tiga oknum TNI dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan seorang pemuda Aceh bernama Imam Masykur tewas. Jasad Imam ditemukan di sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat pada Jumat, 18 Agustus 2023. Pemuda asal Kabupaten Bireuen, Aceh tersebut diduga dibuang usai diculik dan dianiaya hingga tewas oleh anggota Paspampres berinisial Praka RM.

ssb/aha



Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi saat mengikuti rapat bersama KPK, Komnas HAM, LPSK dan Komnas Perempuan, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).



Didik Mukrianto: Tindak Tegas Anggota Kepolisian yang Terlibat Pelecehan Seksual

nggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto memberikan perhatian pada kasus-kasus polisi yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual. la mengingatkan soal komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan tidak akan mengkompromikan anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran sekecil apapun itu. Apalagi dalam UU TPKS disebutkan adanya hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dari profesi pelindung maupun pengayom masyarakat.

TINDAKAN HUKUM YANG TEGAS HARUS DIAMBIL **TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG** TERBUKTI TERLIBAT **DALAM TINDAKAN PELECEHAN** SEKSUAL.

Profesi yang dimaksud adalah tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, Hukumannya ditambah 1/3 dari ancaman pidana.

perlindungan, dan pemulihan korban. Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.

"Tindakan hukum yang tegas harus diambil terhadap anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam tindakan pelecehan seksual. Prosedur hukum harus diikuti dengan cermat dan memastikan perlindungan bagi korban," jelas Didik dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (22/8).

Didik meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pelecehan seksual di Polda Sulsel. Bila terbukti benar, pelaku harus ditindak tegas dan diusut secara pidana. "Karena tidak cukup hanya dengan saksi etik. Kejahatan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang melanggar kemerdekaan seseorang, hak asasi manusia. Sekalipun korban berstatus tahanan, bukan berarti ia bisa menerima perlakuan sewenangwenang," ujar Didik.

Soal masih lemahnya penerapan UU TPKS. Didik juga menyoroti peristiwa kekerasan seksual lain yang juga terjadi di lingkungan kepolisian. Seorang perwira berpangkat AKP terbukti bersalah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap dua anak di bawah umur.

Meski begitu, anggota Polda Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut hanya dijatuhi vonis hukuman 2 bulan penjara. Banyak pihak yang mengkritik keputusan pengadilan, terutama karena kekerasan seksual yang dilakukan sang AKP dilakukan di kantor polisi. "Jadi penting sekali adanya keberanian dari aparat penegak hukum dalam menerapkan UU TPKS bagi pelaku. Tidak terkecuali bagi oknum polisi," ungkap Didik. ssb/aha

Sampah & Sisa Makanan Dapat **Dimanfaatkan** untuk Atasi Permasalahan Pupuk

nggota Komisi IV DPR RI Yessy Melania menyoroti mengenai isu food loss dan food waste atau sampah/ sisa makanan yang tengah menjadi perhatian publik bahkan dunia. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia selain Arab Saudi dengan jumlah sampah makanan terbuang mencapai 23-48 juta ton per tahun.

"Berkaitan dengan kondisi kita secara nasional dan global, kita saat ini di satu sisi tengah berjibaku dengan ketahanan pangan kita sendiri. Kemudian juga secara global kita diancam krisis pangan, itu sudah di mana-mana berita. Tapi di satu sisi data yang kita terima kemudian artikel-artikel juga yang kita baca itu membuat paradoks gitu, jadi bertentangan," ujar Yessy dalam Rapat Keria Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8).

Food loss merupakan makanan yang mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh berbagai faktor selama proses rantai pasokan makanan sebelum menjadi produk akhir dan biasanya terjadi pada tahap produksi, pasca panen, pemrosesan hingga distribusi. Sementera food waste biasanya merupakan makanan sisa berkualitas baik dan layak konsumsi namun kemudian dibuang atau telah kedaluwarsa.

Lanjutnya, melihat besarnya jumlah timbunan sampah makanan terutama dari *food loss* menjadi salah satu indikator belum maksimalnya rantai pangan Indonesia. Untuk

itu, perlu menjadi perhatian bagi Lembaga yang memiliki wewenang dalam hal ketahanan pangan.

Pemerintah pun diharapkan untuk lebih memperhatikan kurangnya sumber daya manusia di sektor pertanian ini terutama pada usia muda. Diketahui saat ini data petani di Indonesia rata-rata berusia di atas 50 tahun dan ketertarikan anak muda yang bekerja di sektor pertanian hanya 4 persen. Sementara melihat kondisi saat ini, petani diperlukan dan dipacu untuk menghasilkan produktivitas dengan mutu dan

kualitas baik untuk menjamin ketahanan pangan.

"Bukan kita menganggap petanipetani senior ini tidak berkontribusi. maksimal, tidak. Tapi melihat urgensinya sekarang sektor pertanian dan melihat target-target nasional dan global kita ini perlu dipacu lebih. Kalau yang senior yang tua ini kan perlu kalau kita ajak berlari kencag mereka tentu juga keteteran, dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas. Nah ini saya pikir juga menjadi persoalan serius untuk negara kita," pungkasnya. - gal/aha





Ansy Lema Minta KLHK **Tegas** Atasi Isu Kejahatan Lingkungan

nggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menyatakan dukungannya terhadap isu ekologi atau lingkungan hidup yang paling terdepan menjadi konsen dunia dan Indonesia saat ini. Kejahatan lingkungan hidup, menurutnya, termasuk ke dalam terorisme di bidang lingkungan hidup (eco terrorism).

"Hari ini yang namanya isu ekologi itu isu yang paling menjadi konsen di dunia dan Indonesia. Jadi tolong, jangan sekedar profit oriented dan kemudian melupakan aspek keberlanjutan ekologi," ujar

pria yang kerap disapa Ansy Lema itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun meminta pemerintah dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus tegas. Lantaran. menurutnya, saat ini banyak oknum yang berdiri melampaui hukum yang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Karena itu, ia menilai

persoalan ini perlu dikawal secara ketat.

"Jujur bapak-bapak ini tidak boleh ada di atas (melampaui) hukum, tidak boleh ada di atas konstitusi. Kalau bapak-bapak menempatkan itu ada di atas, menurut saya kalau terbukti melanggar dipenjara saja supaya ada efek jera. Juiur sava kesal dengan kelakuan-kelakuan seperti ini. Dan terhadap kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kita harus tegas," ungkapnya. --- laz,gal/rdn



JUJUR BAPAK-**BAPAK INI TIDAK BOLEH ADA DI** ATAS (MELAMPAUI) **HUKUM. TIDAK BOLEH ADA DI ATAS** KONSTITUSI. KALAU BAPAK-BAPAK **MENEMPATKAN** ITU ADA DI ATAS. **MENURUT SAYA** KALAU TERBUKTI **MELANGGAR DIPENJARA SAJA** SUPAYA ADA EFEK JERA.



Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023).



Kerja Sama Pelindo dan Mitra **Strategis Harus Mampu** Tingkatkan Pengelolaan Pelabuhan Indonesia

akil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta Pelindo dapat meningkatkan pertumbuhan serta kualitasnya

sehingga mampu bersaing dengan

berbagai negara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan berbagai kerja sama dengan berbagai mitra strategis mancanegara.

"Kami kesini terkait rencana kerjasama Pelindo dengan mitra strategis dari Dubai untuk pengembangan pelabuhan Belawan, dikerjakannya nanti bulan November akan dimulai mau kita cek di berbagai persiapannya di pelabuhan Belawan ini agar nantinya dapat membuat Pelindo semakin kuat dan mampu bersaing dengan negara lain," ujarnya saat

KETUA TIM KUNKER SPESIFIK KOMISI V

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI ke Sumatera Utara, Senin (28/8/2023).

memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI ke Sumatera Utara, Senin (28/8).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menekankan pentingnya keria sama atau sinergitas antar pelabuhan yang ada di seluruh Indonesia agar mampu membuat ekosistem yang kuat. Sehingga mampu menyaingi pelabuhan yang ada di beberapa negara tetangga contohnya singapura serta malaysia.

"Saya garis bawahi juga kalau kita ingin menyaingi Singapura dengan Malaysia maka sebenarnya kalau hanya mengandalkan Belawan itu tidak sanggup, Nah ini harus ada satu ekosistem apalagi sekarang Pelindo sudah merger sehingga Harusnya bisa lebih punya ruang lebih punya lebih punya kemampuan untuk membuat satu ekosistem yang khususnya di Selat Malaka ini bagaimana kita bisa compete dengan Singapura dan Malaysia," tegasnya saat ditemui Parlementaria.

Legislator Dapil Sumut 2 ini juga menyakini kedepan Pelindo akan semakin baik lagi, dengan adanya merger Pelindo terdapat berbagai peningkatan dari sisi holding progres serta sisi kinerja yang meningkat sehingga nantinya akan menjadikan Pelindo semakin kuat sehingga mampu bersaing dengan negara lain. **pdt/aha**





Hilirisasi Tambang Mineral **Harus Dievaluasi Menyeluruh**

nggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring minta hilirisasi yang tengah dilakukan saat ini kembali dievaluasi secara menyeluruh. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan PT Inalum, Senavan. Jakarta, Kamis (24/8/2023).

HILIRISASI INI PERLU **DIEVALUASI SECARA** MENYELURUH. ADA BEBERAPA ALASAN. MISALNYA, SAAT INI DIKATAKAN PERTAMBANGAN **BAUKSIT DAN** SEBAGAINYA TERBILANG

CUKUP BANYAK CARUT-

MARUTNYA.

"Hilirisasi ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ada beberapa alasan. Misalnya, saat ini dikatakan pertambangan bauksit dan sebagainya terbilang cukup banyak carut-marutnya. Pengelolaan, pengawasan yang kita dengar di media-media itu banyak ekspor mining atau mineral itu yang ilegal. Tambang yang

ilegal, dokumennya ilegal, terlibat pula Dirjen dan segala halnya. Agar semua itu memberi keuntungan yang penuh bagi Negara maka perlu evaluasi menyeluruh dari proses hilirisasi tersebut," ujar Tifatul.

Selain itu, lanjut Politisi Fraksi PKS ini, masalah smelter juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rapat di Komisi VII DPR pada bulan Maret tahun lalu itu. Mind Id menargetkan pembangunan proyek semelter di Kabupaten Mempawah akan rampung pada Juli tahun 2023. Kemudian pemerintah mencanangkan larangan ekspor bahan mentah dan konsentrat berlaku Juni Tahun 2023 sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan Minerba.

Namun, sayangnya dalam paparan PT Inalum hari ini smelter di Mempawah itu baru akan selesai pada kuartal ke tiga di tahun 2024 mendatang. Sehingga la menilai larangan ekspor tambang itu tidak visible, karena tidak siapnya smelter dalam negeri, karena alurnya tidak

"Aluminium itu kan banyak gunanya ya, saya kemarin melihat ada orang pesan portable room ke Cina. Sehingga saya teringat hari ini akan rapat dengan Inalum. Darisana, saya berpikir bagaimana jika Inalum yang membuat portable room, portable toilet dan sejenisnya itu yang memang saat ini lebih banyak diproduksi oleh China. Keuntungan aluminium itu kan tidak cepat korosif. Mudahmudahan hal seperti itu bisa terwujud," papar Tif, begitu ia biasa disapa. ayu/aha



Tingkatkan Literasi Keuangan, Komisi XI Minta LPS Edukasi

Masyarakat

nggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara mendukung Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus aktif memberikan pemahaman serta edukasi terkait keuangan kepada masyarakat. Menurutnya, edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan awareness untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.

Hal tersebut disampaikan Amir Uskara dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI terkait Literasi Keuangan dan Pelindungan Konsumen oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Provinsi Bali, Jumat, (25/8). "Saya kira masih perlu banyak sosialisasi kepada masyarakat, karena kita harus maklumi literasi keuangan di masyarakat masih sangat rendah sehingga masyarakat masih sering dimainkan oleh pelaku industri jasa keuangan, apalagi pinjol ini masih sangat berpengaruh di masyarakat," ungkap Politisi dari Fraksi PPP itu.

la mengatakan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan hal yang dibutuhkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat guna memahami sektor keuangan untuk menopang kehidupan yang lebih baik. Apalagi, menurut dia, minimnya literasi keuangan menjadi salah satu penyebab seseorang terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal.

Dirinya pun mendukung LPS untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuka Kantor Perwakilan (Kanwil) di beberapa daerah. Beberapa Kanwil LPS yang ditargetkan beroperasi tahun depan yakni Kanwil Jawa Timur, Kanwil Sumatera Utara dan Kanwil Sulawesi Selatan

"Kita berharap, LPS mulai membuka kantor perwakilan supaya kedekatan dengan industri makin dekat sehingga pengawasan juga semakin bagus untuk dilakukan," katanya. la menambahkan, keberadaan perwakilan LPS di beberapa kota baru diharapkan dapat mendukung sosialisasi dan edukasi mengenai peran dan fungsi LPS yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan dan asuransi.

Lebih lanjut, Amir Uskara mengajak seluruh stakeholder di industri keuangan untuk bersama-

USKARA

(25/8/2023).

literasi keuangan di masyarakat. "Jadi bukan hanya tugas LPS, OJK dan BI. Kami di Komisi XI bersama dengan mitra sampai saat ini melakukan sosialisasi untuk meningkatkan literasi, tetapi tentunya kami juga masih sangat terbatas, karenanya ini menjadi kewajiban yang dilakukan secara bersama," pungkasnya.

ann/aha



Literasi Keuangan dan Pelindungan Konsumen oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Provinsi Bali, Jumat



Bukan Hanya Sekedar Slogan, **Gernas BBI-WBBI Harus** Tersosialisasikan Secara Masif

nggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy mendorong Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (GBBI-BBWI) yang bertujuan untuk menggalakkan pemakaian UMKM lokal karva anak bangsa dapat tersosialisasikan secara masif, merata di seluruh provinsi di Indonesia. Melalui GBBI - BBWI pula diharapkan dapat meningkatkan stimulus untuk UMKM termasuk pelaku ekonomi kreatif.

"GBBI-WBBI jangan hanya sekedar program semata tapi gaungnya belum masif terdengar. Programnya harus disosialisasikan secara masif mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota harus ada sosialisasinya. Sehingga GBBI-WBBI ini bukan hanya sekedar program di tingkat nasional tapi juga dilaksanakan di tingkat daerah sehingga target dan tujuan bangga produk buatan Indonesia dapat tercapai. Karena kan penerimaan devisa terbesar itu berasal dari UMKM," jelas Vera usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke kabupaten Badung, provinsi Bali, Jumat (25/8).

> itu menambahkan seiring adanya dampak arus globalisasi sehingga membuat banyaknya

> > produk

Politisi Partai Demokrat

Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke kabupaten Badung, provinsi Bali, Jumat (25/8/2023).

luar yang masuk ke dalam negeri, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) harus berisinergitas bersama Kementerian/Lembaga terkait agar UMKM dan sektor pariwisata di Bali tetap optimistis semakin tumbuh dan dilirik masyarakat lokal dan mancanegara.

"Sinergitas dan koordinasi antara Kementerian/Lembaga itu bisa dimulai dari Kementerian/ Lembaga itu sendiri misalnya ada gerakan untuk pakai baju batik. Jadi ini menunjukkan kebanggaan kita terhadap produk-produk lokal karya anak bangsa. Produk-produk lokal ini tentu juga harus memiliki nilai jual yang kompetitif dan layak packagingnya. Banyak kan produk lokal itu kurang di packagingnya, padahal produknya sendiri cukup bagus. Nah ini yang harus samasama kita mulai dari sekarang, iadi gerakan bukan hanya sekedar slogan semata," ungkap Vera.

Sebelumnya Deputi Gubernur Bl Doni P. Joewono mengungkapkan Gernas BBI-BBWI merupakan wujud nyata kontribusi BI agar masyarakat Indonesia lebih mencintai dan menggunakan produk atau jasa dari UMKM dan pariwisata lokal. Sejumlah langkah agar pelaku wisata lokal dalam mendukung peningkatan kunjungan dan mengoptimalkan ekosistem pariwisata di Provinsi Bali telah dilakukan oleh BI diantaranya pengembangan kapasitas UMKM yang bertujuan untuk memperbaiki kapabilitas UMKM baik dari sisi SDM maupun proses produksi. - tra/aha

Legislator Apresiasi Langkah OJK **Perkuat Perekonomian Daerah Melalui PAKD**

nggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VIII bersama Himpunan Bank Milik Negara (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) dalam mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan UMKM di Denpasar, Bali.

"Tujuan kami melakukan pertemuan karena ingin mengetahui strategi dan upaya OJK bersama dengan Perbankan Himbara dalam mempercepat akses keuangan daerah di Kota Denpasar - Provinsi Bali," ungkapnya saat memimpin rapat kerja dengan OJK Regional 8 dan Himbara di Denpasar, Bali, Jumat (25/8). Percepatan akses keuangan daerah merupakan salah satu kunci mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya di daerah.

Untuk itu, lanjut Gus Irawan dalam mewujudkan penyediaan akses keuangan daerah diperlukan aksi nyata oleh OJK dalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, perlu dukungan dan komitmen serta sinergi yang baik sektor jasa keuangan khususnya Himbara dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses keuangan, pembiayaan dan permodalan dengan mendayagunakan digitalisasi produk dan layanan keuangan secara konsisten, mudah, cepat, dan transparan. "Perlu sinergitas agar percepatan keuangan daerah dapat berlangsung optimal yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II-2023 sebesar 5,60% (yoy), membaik dibandingkan Triwulan II-2022 yang sebesar 3,09% (yoy). Laju pertumbuhan ekonomi Bali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Nasional sebesar 5,17 persen dan berada di posisi ke-6 tertinggi secara nasional.

"Kami melihat pertembuhan ekonomi di Bali sangat baik dan sehat, ini harus ditingaktkan. Kita terbayang pandemi bali minus 12, tapi saat ini tumbuh bahkan jauh diatas nasional," katanya. Sebelumnya, Friderica Widyasari, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi

dan Perlindungan Konsumen mengatakan pihaknya terus berupaya dalam peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta menggerakkan perekonomian di Bali.

"OJK terus melihat potensi setiap wilayah untuk bisa dikembangkan. Jadi kami lihat potensi kemudian kami channelkan ke perbankan untuk permodalan dan kami juga memberikan edukasi literasi dan inklusi keuangan agar mereka (pelaku usaha) dapat mengelola keuangannya," katanya.



Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat memimpin pertemuan rapat kerja Komisi XI DPR RI dengai OJK Regional 8 dan Himbara di Denpasar, Bali, Jumat (25/8/2023).



Baleg DPR Sepakat **Bentuk Panja RUU Statistik**

adan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah melakukan pembahasan mengenai Revisi Undang-Undang tentang Statistik. RUU ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang telah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Balea) DPR RI Abdul Wahid mengatakan, revisi UU ini dilakukan lantaran keinginan memiliki aturan yang lebih mutakhir dan komprehensif, mengingat statistik memiliki cakupan yang sangat luas. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang presisi dan tepat sasaran membutuhkan data statistik yang akurat.

SAAT INI KAMI MASIH MENYUSUN DRAFT RUU TENTANG STATISTIK. YANG TENTUNYA MASIH MEMERLUKA **TANGGAPAN DARI SELURUH** ANGGOTA DAN AHLI. PEMBAHASAN RUU STATISTIK INI KITA SEPAKAT MEMBUAT PANJA SUPAYA LEBIH MENDALAM, KEMUDIAN KITA JUGA AKAN UNDANG PARA PAKAR.

"Saat ini kami masih menyusun draft RUU tentang statistik, yang tentunya masih memerluka tanggapan dari seluruh Anggota dan ahli," pungkas Abdul Wahid saat Rapat Pleno penyusunan RUU tentang Statistik, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/8).

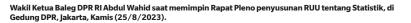
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan, bahwa ke depan pembahasan akan dilakukan dengan mengundang beberapa pakar untuk mendapatkan gambaran besar termasuk mengenai perkembangan metodologi, manajerial, hubungan lintas sektor. Nantinya hasil dialog

tersebut akan diformulasikan bersama para stakeholder.

"Pembahasan RUU statistik ini kita sepakat membuat Panja supaya lebih mendalam. Kemudian kita juga akan undang para pakar," imbuhnya.

tn/aha







Kemenkeu Harus Buat Indikator **Terukur terkait Penerima**

Manfaat Insentif Perpajakan

nggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mercy **Chriesty Barends** meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuat indikator yang terukur berkaitan dengan penerima manfaat insentif perpaiakan di Indonesia. Hal tersebut, menurutnya, penting

DAPAT KAMI LIHAT **BAHWA ADA** SEJUMLAH CATATAN-**CATATAN YANG** TELAH DISAMPAIKAN **OLEH PEMERINTAH BERKAITAN DENGAN PENERIMA**

dengan Kemenkeu di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8). Selama ini, lanjut Mercy, pemerintah selalu memberikan laporan terkait insentif perpajakan, namun tidak secara terbuka untuk menjaga kerahasiaan penerima insentif perpajakan. Untuk itu, pihaknya meminta agar Kemenkeu memaparkan indikator-indikator yang jelas terkait pihak-pihak yang dapat menerima insentif perpajakan.

> Sebab, insentif perpajakan berkaitan dengan tata kelola

penerima manfaat insentif

lagi tidak dijelaskan secara

gamblang atau transparan

berkaitan dengan indikator-

berkaitan dengan penerima

manfaat insentif perpajakan

indikator yang terukur

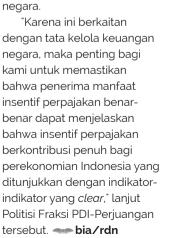
vang dapat mendorong

perekonomian Indonesia,"

ujarnya dalam Raker Banggar

perpajakan, namun lagi-

"Karena ini berkaitan dengan tata kelola keuangan negara, maka penting bagi kami untuk memastikan bahwa penerima manfaat insentif perpajakan benarbenar dapat menjelaskan bahwa insentif perpajakan berkontribusi penuh bagi indikator yang clear," lanjut





Anggota Banggar DPR RI Mercy Chriesty Barends saat mengikuti pertemuan Raker Banggar dengan Kemenkeu di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2023).





Jangan Hanya Sekadar Tambah Ekuitas, **Pemberian PMN Harus** Membawa Maslahat bagi Rakyat

akil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis

Bvarwati menegaskan bahwa pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak hanya sekadar menambah ekuitas saja. Tetapi juga harus dimanfaatkan oleh BUMN untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.

Demikian ia sampaikan pernyataan tersebut usai mengikuti Kunjungan Kerja guna menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap PT Geo Dipa dan Perum Bulog di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (29/8/2023). Sebab itu, ia ingin pemberian PMN diiringi dengan adanya evaluasi berkala.

"Kita tidak ingin PMN ini sebagai sebuah rutinitas, tetapi harus ada evaluasinya dan harus (memberikan) efek multiplier karena bagaimana pun itu adalah uang negara yang digunakan (oleh BUMN) harus kembali kepada rakyat ya," tutur Anis kepada Parlementaria.

Hal ini menjadi perhatiannya lantaran ia menerima informasi berupa PMN yang diberikan tidak mampu membuat perusahaan pelat merah mencapai target yang ditetapkan. Upaya evaluasi dalam bentuk rangkaian Kunjungan Kerja BAKN DPR ini, jelasnya, diharapkan dapat menggali informasi secara mendalam sehingga BAKN DPR

dapat memberikan rekomendasi yang signifikan untuk pemberian PMN yang lebih mangkus.

"Kita berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara menveluruh, terutama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sudah sejak lama menjangkit BUMN. Jadi, kita pun bisa memberikan rekomendasi dan solusi soal PMN ini secara efektif, terutama terkait hutang BUMN juga," pungkas Politisi Fraksi PKS itu.

pemberian PMN kepada BUMN dengan melaksanakan kontrak kinerja dengan direksi BUMN dan Kementerian BUMN.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024. Pemerintah Indonesia menetapkan nilai PMN diperkirakan akan mencapai Rp28,59 triliun. Secara rinci, nilai PMN tersebut terdiri dari Rp14,4 triliun kepada BUMN di sektor infrastruktur dan PMN sektor lainnya Rp14,19 triliun. ** ts/rdn













WAKIL KETUA DPR RI, RACHMAT GOBEL SAAT MEMBUKA ACARA BAZAR DAN PASAR MURAH BERTAJUK "BERSAMA PIA BERBAGI KEBAHAGIAAN DALAM RANGKA HUT DPR RI KE-78 TAHUN," DI SENAYAN, JAKARTA, SENIN (28/8/2023). FOTO: AZK/PDT

















